ANALISIS EFEKTIFITAS PROGRAM PINJAMAN DANA BERGULIR PADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PNPM MANDIRI DAN KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) DI KECAMATAN SITUJUH LIMO NAGARI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2008-2010

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebahagian Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen

oleh

RAHMATIKA

07152028

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2011

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan di Indonesia. Menurut Laporan pencapaian Millenium Development Goals (MDG'S) Indonesia tahun 2007, penduduk miskin Indonesia tahun 1976 sebesar 40,1 %, selanjutnya tahun 1996 dapat ditekan menjadi 17,47%. Namun dengan adanya krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah penduduk miskin kembali naik menjadi 24.2 % pada tahun 1998, dan Pemerintah kembali berhasil menekan angka kemiskinan menjadi 15,97% di tahun 2005. Namun mengalami kenaikan kembali di tahun 2006 menjadi 17,75% disebabkan oleh lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) pada maret dan Oktober yang berdampak terhadap kenaikan harga berbagai barang kebutuhan pokok dan akhirnya di tahun 2007 menjadi 16.58% atau sekitar 37,17 juta jiwa.

Tabel 1.1

Jumlah dan persentase penduduk miskin Indonesia 1996-2007

Tahun	Jumlah penduduk miskin (juta)	Persentase penduduk miskin
1996	34.01	17.47
1998	49.5	24.23
1999	47.97	23.43
2000	38.7	19.14
2001	37.9	18.41
2002	38.4	18.2
2003	37.3	17.42
2004	36.1	16.66
2005	35.1	15.97
2006	39.3	17.75
2007	37.17	16.58

Sumber : Data Sekunder BPS

Banyak usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan beberapa diantaranya meluncurkan berbagai program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh berbagai kementerian dan lembaga. Program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat tersebut antara lain adalah : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri, P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan Departemen Pekerjaan Umum, P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil) yang dilaksanakan Departemen Pertanian, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan, KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan Departemen Sosial, dan lain-lain. Program-program tersebut berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan Departemen yang bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial dan sektoral.

Sebagai upaya serius dalam meningkatkan efektifitas penekanan angka kemiskinan, pemerintah telah memiliki konsep penanggulangan kemiskinan secara terpadu dengan basis pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat sebagai subjek penanggulangan kemiskinan bukan objek dengan kata lain pemerintah telah memerhatikan faktor partisipasi sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan dalam program pengentasan kemiskinan. Program yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Palu pada tanggal 1 Mei 2007 bernama program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program Ini terdiri dari beberapa program penanggulangan kemiskinan salah satunya Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan atau disingkat

menjadi PNPM Mandiri perdesaan yang sebelumnya bernama PPK (Program Pengembangan Kecamatan)

Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri perdesaan) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam Upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di perdesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualltas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di perdesaan.

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian yaitu mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumberdaya yang ada di lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, khususnya masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah : peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya, pelembagaan system system pembangunan partisipatif, pengoptimalan fungsi dan peran pemerintah local, peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana social dasar dan ekonomi masyarakat dan pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Sumber dana pelaksanaan PNPM Mandiri berasal dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi
c. APBD Kabupaten/Kota sebagai dana pendamping
d. Kontribusi swasta sebagai perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility);

e. Swadaya masyarakat (asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan individu/kelompok peduli lainnya).

Sumber-sumber dana bagi pelaksanaan PNPM Mandiri tersebut di atas digunakan untuk keperluan komponen-komponen program yaitu:

a. Pengembangan Masyarakat;
b. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
c. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal dan
d. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program.

Semua dana dan kegiatan program PNPM Mandiri perdesaan tersebut disalurkan kepada masyarakat terutama komponen program bantuan Langsung Masyarakat (BLM). BLM adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin. Bantuan ini biasanya diberikan dalam bentuk dana bergulir.

Berdasarkan Buletin Bina Swadaya, yaitu sebuah Badan pengembangan swadaya masyarakat, keberhasilan dan keberlanjutan upaya pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan instrumen dana bergulir ditentukan oleh 3 hal. Pertama, efektifitas penyelenggaraan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Kedua, efektifitas pendampingan kelompok dan terakhir kesiapan lembaga pelayanan (dalam hal ini UPK) untuk bermitra. Hal ini senada dengan yang tertulis pada Pelembagaan Pengelolaan Dana Bergulir dalam Penjelasan PTO X Pengelolaan Dana Bergulir bahwa Pengelolaan dana bergulir dalam PPK pada

hakekatnya dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal yaitu kelompok peminjam sebagai pengelola dan penyalur dana bergulir kepada anggotanya sebagai pemanfaat langsung, aturan dan prosedur atau mekanisme perguliran, serta Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola dan penyalur seluruh dana bergulir di tingkat kecamatan.

Efektifitas penyelenggaraan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) perhitungannya dapat diwakili oleh Rasio profitabilitas karena rasio profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu rasio profitabilitas juga akan menunjukan kombinasi efek dari likuiditas, manajemen aktiva dan utang pada hasil operasi. (Brigham dan Houston, 2006). Kemudian Rasio profitabilitas ini dilakukan perbandingan sebelum dan sesudah mendapat bantuan dana bergulir.

Ada tiga rasio yang sering dibicarakan dalam rasio profitabilitas Yaitu *Profit Margin, Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). (Hanafi dan Halim,1996)

Profit Margin menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya (ukuran efisiensi) di perusahan pada periode tertentu.

Kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu bisa dilihat dari *Return On Asset* (ROA) yang juga sering disebut *Return on Investment* (ROI).

Terakhir adalah tingkat pengembalian atas modal yang biasa disebut dengan *Return On Equity* atau ROE yaitu dengan membagi laba bersih dengan modal yang dimiliki.

Untuk efektifitas Prosedur mekanisme perguliran bisa dilihat dengan membagikan kuesioner mengenai efektivitas proses penyaluran dan penerimaan dana bergulir kepada Kelompok Masyarakat yang mendapat bantuan berupa dana bergulir ini.

Hal terakhir yang mempengaruhi pengelolaan dana bergulir adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Indikator yang bisa digunakan adalah instrument pengukur kinerja yang baru diperkenalkan pada tahun 2007 oleh PNPM sendiri yaitu berupa rasio keuangan CCr, ROI, LAR, PAR yang ditujukan untuk mengukur kesehatan UPK dan kaitannya dengan kesiapan warga dalam menerima intervensi lanjutan dari pemerintah untuk tahun berikutnya. (PNPM Mandiri Perkotaan, 2010)

CCr atau *Cost Coverage Ratio*, mengukur berapa besar rasio pendapatan dibandingkan biaya. Berapa pendapatan yang meng-cover biaya. Dikatakan berkinerja baik apabila lebih besar dari 125%, artinya bila UPK berani untuk mengeluarkan biaya Rp 100, maka UPK harus dapat memperoleh pendapatan minimal Rp 125.

Berikutnya ROI atau *Return on Investment*, menunjukkan kemampuan UPK dalam menghasilkan laba. Dikatakan sehat apabila UPK PNPM dapat memperoleh minimal 10%, ini berarti jika UPK PNPM mengelola dana bergulir Rp 60.000.000, maka minimal laba pertahun adalah Rp 6juta.

Selanjutnya *Portofolio At Risk* atau disingkat dengan PAR, menunjukan jumlah KSM yang beresiko hilang atau menunggak lebih dari tiga bulan. Dikatakan PNPM dalam kondisi sehat apabila LAR kurang dari 10%, ini berarti bila dana bergulir dikucurkan kepada 24 KSM maka KSM yang bermasalah harus kurang dari 2 KSM.

Yang terakhir adalah LAR atau Loan At Risk, yang menunjukkan sejumlah nilai dana bergulir dalam beresiko hilang atau menunggak lebih dari tiga bulan. Dikatakan sehat apabila PAR kurang dari 10%, yang berarti dari Rp 60juta, dana yang ditolelir dalam keadaan menunggak lebih dari 3 bulan maksimal Rp 6juta.

Efektifitas Program Bantuan Dana Bergulir Pada Kelompok Swadaya Masyarakat Di Kota Depok (Studi Kasus BKM Bina Budi Mulyadi Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok), yang mengkaji tentang efektivitas proses penyaluran dan penerimaan dana bergulir dan dampak program bantuan terhadap penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan potensi pengembangan usaha. Dimana hasilnya adalah persepsi KSM terhadap kinerja BKM dengan program P2KP yang berkaitan dengan proses seleksi, proses penyaluran dan pencairan dana serta proses pendampingan cukup efektif. Rata-rata KSM merasa efektif dengan kinerja BKM di kelurahan mereka. Dengan uji Wilcoxon hasilnya terdapat perbedaan signifikan sesudah penerimaan dana bergulir (Susiana, 2009).

Di kecamatan Situjuh Limo Nagari PNPM Mandiri telah terlihat dampaknya oleh penulis. Contohnya, ladang ubi yang dulu dijual secara langsung kepada pembeli sekarang dengan adanya pinjaman dana bergulir telah diolah

sendiri oleh pemilik menjadi produk makanan yang tentunya memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Begitu juga dengan sarana fisik telah berhasil diperbaiki dan berdiri di sini seperti pasar, jalan dan Sekolah Taman Kanak-kanak. Oleh karena itu penulis tertarik untuk lebih mengetahui efektifitas PNPM Mandiri dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Penulis dalam hal ini lebih memperhatikan pada aspek " **Analisis Efektifitas Program Pinjaman Dana bergulir pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2008-2010**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah efektifitas Prosedur mekanisme perguliran dana bergulir Unit Pengelola Kegiatan dilihat dari sisi masyarakat penerima program dana bergulir.
2. Bagaimanakah efektifitas dana bergulir pada UPK PNPM Mandiri di kecamatan Situjuah Limo Nagari dilihat dari *Cost Coverage Ratio* (CCr) ,*Return on Investment* (ROI), *Portofolio at Risk* (PAR) dan *Loan at Risk* (LAR)
3. Apakah terdapat perbedaan *Profit Margin, Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE) Kelompok SPP sesudah penerimaan dana bergulir dari UPK PNPM Mandiri di Kecamatan Situjuh

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektifitas Prosedur mekanisme perguliran oleh Unit Pengelola Kegiatan dari sisi masyarakat penerima program dana bergulir
2. Untuk mengetahui Efisiensi biaya, pencapaian laba, pinjaman yang tertunggak dan peminjam yang menunggak dari Pinjaman Dana bergulir pada UPK PNPM Mandiri di Kecamatan Situjuh.
3. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan Laba bersih keefektifan dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang tersedia dan pengembalian yang diperoleh pemilik atas investasinya terhadap Kelompok Simpan Pinjam Perempuan setelah penerimaan dana bergulir.
4. Untuk mengetahui kesiapan masyarakat Situjuh dalam menerima bantuan tahun berikutnya.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini:

1. Memberikan Informasi Kepada Pemerintah daerah tentang kinerja PNPM Mandiri sehingga bisa melakukan perbaikan
2. Memberikan Informasi kepada masyarakat luas sebagai pemilik, tentang kinerja PNPM Mandiri
3. Menambah pengetahuan tentang Penilaian Kinerja PNPM Mandiri dalam pengelolaan dana bergulir.
4. Mengetahui pengaruh hadirnya PNPM Mandiri terhadap Kelompok Swadaya Masyarakat Situjuh yang telah ada
5. Sebagai masukan pada penelitian dengan topik yang sama pada masa yang akan datang.

4.5 SANKSI MUSYAWARAH ANTAR NAGARI III

Musyawarah Antar Nagari III adalah musyawarah yang diadakan untuk ketiga kalinya yang dihadiri oleh pejabat nagari, tokoh masyarakat, Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan perwakilan dari PNPM untuk memusyawarahkan keputusan yang berhubungan dengan pendanaan. MAN III ini menelurkan berapa kesepakatan dan sanksi.

Sanksi yang khusus untuk Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan adalah sebagai berikut:

1. Kelompok yang tidak mengembalikan pinjamannya ke Kecamatan maka jorong kelompok tersebut juga dikenakan sanksi tidak boleh ikut berkompetisi sebelum kelompok simpan pinjam Jorong yang bersangkutan melunasi pinjamannya ke UPK Kecamatan Situjuh Limo Nagari.
2. Apabila pengembalian SPP tidak tepat pada waktunya atau menunggak tetap akan dilakukan penagihan dan pada tahap berikutnya tidak diikut sertakan lagi.Kemudian diberikan sanksi sebagai berikut :
    a. Diumumkan di mesjid oleh TPK setempat dan ditempel pada papan informasi.
    b. Denda 10 % dari cicilan apabila terlambat satu hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.
    c. Sanksi nagari terhadap pelayanan administrasi nagari.

    Bagi Kelompok atau anggota yang tidak mengindahkan poin a, b dan c maka akan diproses melalui jalur hukum (perdata dan pidana)

BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diungkapkan pada bab lima, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektifitas Pengelolaan dana bergulir dipengaruhi oleh 3 hal yaitu Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola dan penyalur seluruh dana bergulir di tingkat kecamatan, aturan dan prosedur atau mekanisme perguliran, serta pemanfaat langsung berupa kelompok peminjam sebagai pengelola dan penyalur dana bergulir kepada anggotanya.
2. Efektifitas pengelolaan dana bergulir oleh Unit Pengelola kegiatan dapat dilihat dari kinerja UPK tahun 2008-2010. Indikatornya adalah *Loan at Risk (*LAR)*, Portfolio at Risk* (PAR) *,Return On Invesment* (ROI) serta *Cost coverage Ratio* (CCr). Secara umum kinerja UPK semakin membaik dari tahun ketahun. Terutama dengan tidak adanya Kelompok peminjam yang melakukan tunggakan.
3. Efektifitas Prosedur mekanisme perguliran, yang didapat dari kuesioner yang dibagikan kepada pemanfaat dana bergulir, dianggap sudah efektif baik persepsi umum terhadap PNPM, proses seleksi, proses penyaluran dan pencairan dana serta proses pendampingan.
4. Terakhir efektifitas dana bergulir pada pemanfaat langsung, untuk *Profit Margin* diterima H_0 yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan setelah dan sebelum dana bergulir. Sedangkan untuk ROA dan ROE H_0

ditolak yang mengartikan bahwa terdapat perbedaan yang cukup nyata setelah dan sebelum perguliran.

6.2 Saran

Adapun saran yang diajukan penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Sebagian dari anggota Kelompok SPP belum sanggup untuk mengelolah atau me*manage* keuangan perusahaan, sehingga bagi mereka samar-samar untuk menentukan keuntungan, upah tenaga kerja dan modal yang disertakan dari usaha sendiri. Oleh sebab itu, Kelompok SPP ini perlu mendapatkan bimbingan yang kontinyu tentang administrasi keuangan.

2. Dengan adanya pembayaran cicilan tanggung renteng, sebagian kecil dari anggota Kelompok SPP menjadi terpecah-pecah bahkan menjadi gejolak sosial yang kurang sehat di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, ada juga anggota Kelompok SPP ini yang takut bergabung kalau-kalau nantinya, dia saja yang akan menyandang hutang teman sekelompoknya jika terjadi tunggakan dalam pembayaran cicilan. Untuk itu, UPK perlu mencarikan jalan keluarnya berupa pembinaan kesadaran dan tanggung jawab terutama bagi mereka yang curang dalam pembayaran hutang sehingga rasa was-was yang demikian bisa diminimalkan atau dihilangkan sama sekali.

3. Pemerintah sebaiknya mengadakan pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat sehingga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam

berwirausaha dan juga menggali potensi yang dimiliki daerah tersebut untuk dijadikan usaha. Dalam artian bagi masyarakat yang telah memiliki usaha mampu mengembangkan usahanya untuk menembus pasar yang lebih luas dan bagi masyarakat yang belum memiliki usaha tertarik untuk berwirausaha dengan ide-ide yang kreatif dan inovatif.

4. Bagi masyarakat sendiri diharapkan secara aktif mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan, baik oleh pemerintah maupun Unit Pengelola Kegiatan (UPK) serta melakukan pengembangan terhadap usaha yang telah dimiliki

6.3 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya menggunakan 80 responden untuk mengetahui efektifitas Prosedur mekanisme perguliran serta 46 sampel untuk efektifitas kelompok peminjam dana bergulir dengan periode penelitian 2008-2010. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan jumlah responden yang lebih banyak dan periode yang lebih panjang.

2. Penilaian efektifitas kelompok peminjam hanya dengan melihat rasio profitabilitas setelah dan sebelum pinjaman dana bergulir, dengan menggunakan variabel laba bersih, penjualan, modal dan asset. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel lain seperti tenaga kerja, pertambahan cabang perusahaan, aspek manajerial, kepuasan konsumen dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Arditobhinadi. 2008. *Menilai Kinerja keuangan Lembaga Mikro*. http://arditobhinadi.wordpress.com/2008/06/02/menilai-kinerja-lembaga-keuangan-mikro/ (6 Desember 2010)

Artikel.2010. *Si ROY LAPAR, sang Indikator PNPM*. http://www.p2kp.org/wartadetil.asp?mid=3136&catid=2& (22 November 2010)

Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Modul Khusus Komunitas – Pinjaman Bergulir. Jakarta

F.Brigham, Eugene & Joel F.Houston.2006. *Dasar-dasar manajemen Keuangan,* edisi sepuluh. Salemba Empat : Jakarta.

Hadi, Agus Purbathin. Tinjauan Terhadap Berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. Jurnal dari Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)

Hanafi, Mamduh dan Abdul halim. 1996. *Analisis Laporan Keuangan.* Yogyakarta : AMP-YKPN

Irawan, Prasetya. 1999. *Logika dan Prosedur Penelitian.*Jakarta: P.T Repro Internasional

M Effendy, Sofian. 1991. *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara, Semarang

Panggabean, Riana. 2005. *Efektivitas Program dana Bergulir bagi koperasi dan UKM.* Infokop No.26 tahun XX. Jakarta

Priyatno, Duwi. 2010. *Paham analisa statistic data dengan SPSS*. Mediakom: Yogyakarta.

R, Burhanuddin. 2006. *Evaluasi program Bantuan dana Bergulir Melalui KSP/USP Koperasi (pola pkps-bbm, agribisnis dan Syariah).* Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM Nomor 1 tahun 1.

Rosdiwati. 1992. *Statistik dan Penggunaanya 2.* Angkasa Raya : Padang.

Santoso, Singgih. 2010. *Panduan Lengkap Menguasai Statistik dengan SPSS 17*. PT Elex Media Komputindo : Jakarta.

Sekaran, Uma. 2006. *Metodelogi Penelitian Untuk Bisnis*, buku 1 edisi empat. Salemba Empat : Jakarta